

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MAPPI

Matius Liaran¹

¹Universitas Terbuka, matiusliaran171@gmail.com

Korespondensi Penulis: Matius Liaran

Abstrak: Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dikelola secara baik dan lebih profesional serta diharapkan mampu menunjang usaha peningkatan perekonomian, menjadi sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan program pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi terhadap PAD Kabupaten Mappi tahun 2010 – 2020. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tingkat kemaknaan untuk setiap uji statistik. Untuk mendapatkan hasil yang baik maka uji asumsi klasik semua terpenuhi. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama penelitian dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah. Koefisien determinasi ganda (R^2) diperoleh, artinya model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel independen sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Saran-saran yang diajukan agar pemerintah daerah meningkatkan pendapatan sektor riil seperti pertanian, perikanan perdagangan, pertambangan, aspek ekonomi lainnya, lembaga keuangan, jasa-jasa. Dengan penetapan tarif sesuai regulasi otonomi daerah dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka pungutan pajak dan retribusi dapat diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah serta pelayanan, demi pembiayaan serta mengendalikan program pembangunan daerah tetap mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan. Pemerintah daerah hendaknya menekan pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi peledakan jumlah penduduk yang tinggi dengan cara meningkatkan penyuluhan keluarga berencana secara kelompok maupun melalui media lainnya.

Kata kunci: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Inflasi

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah., seperti di atur dalam UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi

Daerah. Namun dalam prinsip kebijakan perimbangan keuangan dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 2 dijelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan pemerintah Daerah. Pemerintah pusat juga bertugas untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan fiskal di daerah, untuk itu Pemerintah Pusat memberikan Dana Perimbangan.(Azis,1997) .

Menurut (Todaro, 1997:105) faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari suatu negara atau masyarakat yaitu pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang. Menurut Kuncoro (1995: 334-358) Dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara PAD dengan bantuan pusat sangat menjolok sekali lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat minim dalam membelanjai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan.

Jadi PDRB adalah nilai tambah yang pengukurannya berdasarkan adanya aktivitas ekonomi di suatu wilayah.Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah (sukirno,1978)

Menurut Kuncoro (1995: 334-358) Dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara PAD dengan bantuan pusat sangat menjolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat minim dalam membelanjai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dapat memberikan manfaat agar tiap-tiap daerah bisa membiayai kehidupan daerahnya dengan perolehan hasil daerah baik berupa retribusi, pajak pendapatan, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain. Atas dasar pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keseluruhan daerah sebagai suatu kesatuan wilayah kehidupan maupun kehidupan setiap individu anggota masyarakat karena pelaksanaan pembangunan nasional berada didaerah, maka rencana pembangunan daerah merupakan bagian dari kerangka umum pola pembangunan nasional dan daerah haruslah saling menunjang.

Tingkat Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum atau terus menerus. Kenaikan harga meliputi semua barang dan proses kenaikan secara berkesinambungan. Kenaikan harga berlangsung cukup lama dan terus menerus. Inflasi juga dapat memperburuk kesejahteraan masyarakat akibat menurunnya daya beli masyarakat secara umum akibat harga-harga naik. Selain itu distribusi pendapatan pun semakin buruk akibat tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan inflasi yang terjadi.

Jumlah Penduduk (dikutip oleh Santosa dan Rahayu, 2010) Menjelaskan bahwa, dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan uraian di atas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti PAD Kabupaten Mappi dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah berjudul “Analisis Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mappi Periode 2010 - 2020 ”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap PAD Kabupaten Mappi?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD Kabupaten Mappi?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap PAD Kabupaten Mappi?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD), menganalisis produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap PAD, menganalisis Tingkat Inflasi terhadap PAD, terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Mappi.

Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan tingkat inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mappi pada tahun 2010-2020.

KAJIAN PUSTAKA

Potensi Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Keuangan yang berhasil akan dapat mengumpulkan dana dari masyarakat bagi pembiayaan pembangunan. Dengan demikian Pemda dapat menyediakan *social overhead capital* yang memadai. Keberadaan *social overhead capital* menentukan Keberhasilan Negara dalam diversifikasi produk, perluasan perdagangan, mendukung perkembangan penduduk, pengentasan kemiskinan dan perbaikan kondisi lingkungan hidup. Bagi Pemda,

1. Kondisi Awal Suatu Daerah;

Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah menentukan :Pertama,Besar kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan pungutan-pungutan. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi atau rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik dalam kualitas dan kuantitas tertentu.Pada masyarakat agraris (daerah yang berbasis pertanian) misalnya, tuntutan akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu akan lebih rendah daripada tuntutan yang ada di masyarakat industri (daerah yang berbasis industri).

2. **Peningkatan Cakupan atau Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan;**

Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan. Dalam usaha peningkatan cakupan ini, tiga hal yang harus diperhatikan adalah: Menambah obyek dan subyek pajak dan atau retribusi. Peningkatan cakupan pendapatan dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak dan atau retribusi

3. **Perkembangan PDRB Perkapita Riil;**

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah (Provinsi/ Kabupaten), semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya.

4. **Pertumbuhan Penduduk;**

Dalam hal tertentu, besarnya pendapatan dapat dipengaruhi langsung oleh jumlah penduduk. Bila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat. Tetapi pertumbuhan penduduk mungkin tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proporsional.

5. **Tingkat Inflasi;**

Inflasi akan meningkatkan penerimaan pendapatan pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak pembangunan I dan PBB. Pada pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada tarif secara flat, maka inflasi diperluhkan dalam pertimbangan perubahan tarif.

6. **Penyesuaian Tarif;**

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak, retribusi atau leges yang tarifnya ditentukan secara tetap (flat), maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi.Kegagalan untuk menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan daerah. Dalam rangka penyesuaian tarif retribusi daerah,selain harus memperhatikan laju inflasi, perlu juga ditinjau hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan pendapatan.

7. **Pembangunan Baru;**

Penambahan pendapatan dapat juga diperoleh bila pembangunan-pembangunan baru ada, seperti misalnya pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah dan lain-lain.

8. Sumber Pendapatan Baru;

Adanya kegiatan usaha dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Misalnya, usaha persewaan (rumah sewa), usaha persewaan komputer dan lain-lain.

9. Perubahan Peraturan;

Adanya peraturan-peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan atau retribusi, jelas akan meningkatkan pendapatan daerah.

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam era otonomi daerah ini, bentuk hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah terdiri dari: 1). Desentralisasi; 2). Dekonsentrasi; 3). Tugas pembantuan; dan. 4). Pinjaman daerah

• Desentralisasi Fiskal;

Sejalan dengan tuntutan demokratisasi dalam bernegara, penyelenggaraan pemerintahan juga mengalami perubahan. Sistem pemerintahan yang semula lebih condong pada sentralisasi menjadi desentralisasi. Selaras dengan perubahan sistem tersebut, maka tata aturan juga mengalami perubahan yang lebih mengarah kepada penyempurnaan pelaksanaan otonomi daerah, melalui pemberian kewenangan yang seluas-luasnya dengan tetap menjaga kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

• Dekonsentrasi;

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi. Dalam pelaksanaannya, instansi yang melaksanakan adalah dinas Provinsi sebagai perangkat Pemerintah Daerah Provinsi. Latar belakang adanya dekon ini karena ada kegiatan-kegiatan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat yang harus dilakukan di daerah.

• Tugas Pembantuan;

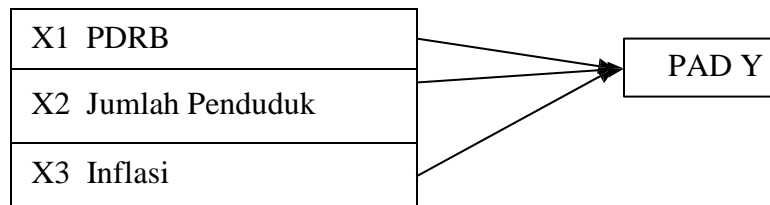
Walaupun terpisah, bisa dikatakan bahwa bentuk hubungan tugas pembantuan mirip dengan dekonsentrasi, hanya yang menjadi sasaran.Pemerintah Pusat ini adalah Pemerintah Daerah dan Desa serta sifatnya bukan pelimpahan kewenangan tapi penugasan.Disamping itu, pihak yang memberikan tugas pembantuan tidak terbatas dari Pemerintah Pusat tapi bisa berasal dari tingkatan pemerintah di atasnya seperti dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten atau Kabupaten ke Kecamatan sampai ke Desa.

• Pinjaman Daerah;

Bentuk hubungan yang terakhir ini berbeda dengan dua bentuk diatas dalam hal sumber pembiayaannya. Untuk membiayai kebutuhan. Daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal), Daerah dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (Pemerintah Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar negeri dengan perse tujuan dan melalui Pusat. Sumber pinjaman bisa berasal dari sumber di luar keuangan negara, yaitu jika pinjaman berasal dari lembaga swasta atau masyarakat langsung.Penggunaan:

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, untuk mencari pengaruh variable Pendapatan Domestik Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan Inflasi terhadap PAD maka digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Mengacu kepada latar belakang dan rumusan masalah yang hendak dicapai, maka metode penelitian ini akan dirinci antara lain obyek dan desain penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengolahan data dan teknik analisa data. Teknik analisis dilengkapi dengan uji asumsi klasik, yaitu: uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

Data Dan Sumber Data

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah data dasar BPS dan DPPKAD Kabupaten Mappi Papua. Desain penelitian berdasarkan pengamatan atas fenomena masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah kabupaten Mappi Papua dari perspektif kualitas pelayanan dengan menggunakan landasan teori yang baku dan teruji.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari data yang diperlukan untuk penyusunan Karya Tulis ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan;

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dengan pengumpulan bahan-bahan yang dipelajari dan digali dari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan daerah yang diharapkan dapat mendukung dengan permasalahan atau obyek yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder;

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan arsip- arsip yang mendukung penelitian.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri variabel pengaruh (variabel independen), dan variabel terpengaruh (Variabel Dependen) dapat dirinci sebagai berikut:

- Variabel independen adalah pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk.
- Variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah.

Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Peneliti menyusun pedoman koding, yang digunakan sebagai panduan dalam membuat variabel terhadap data-data *times series*.
- b. Setelah diberi kode, data diolah menurut masing-masing variabel dengan program *SPSS versi*
- c. Kemudian dilakukan uji analisis data.

Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program *SPSS for Windows ver.16* dengan tingkat kemaknaan untuk menolak hipotesis nol adalah $< 0,05$ untuk setiap uji statistik. Langkah-langkah regresi linier berganda yang dilakukan.

Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda untuk mencari hubungan sekaligus pengaruh suatu variabel yang bermakna dengan persamaan *double logaritma natural*(Ln):

Uji Statistik

- a. **Uji Ketepatan Parameter Penduga (*estimate*)**
Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
- b. **Uji Ketepatan Model**
Uji ini digunakan untuk menguji keberartian koefisien regresi secara bersama-sama/simultan, dengan Uji hipotesis
- c. **Koefisien Determinasi Ganda (R^2):**
Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik tidaknya regresi yang terestimasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Luthans. 2000. *Perilaku Organisasi Edisi X*. Yogyakarta: Andi.
- Mangkunegara. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prawirosentono, Suyadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Robbins, SP. 2006. *Perilaku Organisasi Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, Sondang P. 1989. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sinambela, 2012. *Kinerja Pegawai. Graha Ilmu*, Yogyakarta